

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Farid Zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. 2018. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Adami Chawazi. 2010. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayumedia.
- Agus Yudha Handoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad Nashih. 2011. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria*. Yogyakarta. STPN Press.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*. Jakarta. Chandra Pratama.
- Aminuddin Salle. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta. Kreasi Total Media.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Mahakarya Rangkang Offset.
- Andi Hamzah. 2005. *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2007. *Korupsi Di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. PT. Raja Grafiindo Persada.

- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta. Djambatan.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Elza Syarif. 2012. *Menuntaskan Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- H. M. Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- H. M. Arba, 2021. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ilham Lasahido. 2006. *Modul Penanganan Surat, Diklat, Departemen Keuangan Nasional*. Jakarta. Media Group.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta. Mirra Buana.

- Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Sekjen MK RI.
- Jimmy Joses Sembiring. 2010. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta Selatan. Visimedia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung. Mandar Maju.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Kompas.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Penerbit Genta Publishing.
- Seno Adji Indriyanto. 2009. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta. Diadit Media.
- Soerjono Soekanto. 1976. *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia suatu tinjauan secara sosiologis*. Bandung.

Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung. Ramadja Karya.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-5*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-13*. Jakarta. Rajawali Press.

Supriadi. 2008. *Hukum Agraria*. Jakarta. Sinar Grafika.

Tadjuddin Rachman. 2017. *Tanah dan Jaminan Kepastian Hukum*. Jakarta. Yapensi.

Tb Ronni Rahman Nitibaskara. 2007. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum. Terbitan Kedua*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara

Teguh Prastyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Theo Hujibers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta. Kanisius.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Edisi Pertama Cetakan ke-1*. Jakarta. Kencana.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Undang-Undang

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Pasal 2-7 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Amran Suadi. 2021. *Law Enforcement against Corruption in the Criminal
Justice System in Indonesia*. Annals of R.S.C.B. Vol. 25. Issue 6.

Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:
Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia* Jurnal
Ilmu Hukum. Volume 8 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas
Lampung.

Febryan Nur Muhammad. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap
pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris*. Yogyakarta.
Vol.1.No.1.

Imron Rosyadi. 2007. "*Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*".
Jurnal Sains dan Inovasi III (2).

Nuraini L. "*Sumber Daya dalam Penanganan Kasus Korupsi*". Jurnal Penegakan Hukum. Vol. 10, No. 1.

Rudiansyah. 2021. "*Pendidikan Hukum bagi ASN dan Kepala Desa dalam Pengadaan Tanah*". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 12, No.1.

Sari, D dan Prabowo, A. 2020. "*Birokrasi dan Korupsi dalam Pengadaan Tanah*". Jurnal Administrasi Publik. Vol. 8, No. 2.

Sumber Internet

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

Mochamad Harris <https://www.gramedia.com/literasi/tanah/> diakses pada 20 Februari 2024.

Muhammad Darwan, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7209023/babak-baru-kasus-korupsi-bendungan-paselloreng-wajo> diakses pada 28 Maret 2024.

Eka Hakim <https://www.liputan6.com/regional/read/5360306/kejati-sulsel-geledah-kantor-bpn-wajo-dan-snvt-pembangunan-bendungan-bbws-pompengan?page=2> diakses pada 28 Maret 2024.

AESIA, Berbagai Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Aesia. Kemenkeu. Juli 2023. <https://aesia.kemenkeu.go.id/berita-properti/properti/berbagai-hak-atas-tanah-menurut-undang-undang->

nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria-86.html.

Wawancara

Wawancara langsung dengan Bapak Dr. Muhammad Khalid Ali, S.H.,M.H.
selaku Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Makassar

Wawancara langsung dengan Bapak Dr. Muhammad Tasbih, S.H.,M.H.
selaku Jaksa Agung Muda Pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Wawancara langsung dengan Bapak Dr. Andi Irfan Hasan, S.H.,M.H selaku
Jaksa Agung Muda Pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.